

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2016. *Peralihan hak atas tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bushar Muhammad. 1981. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Fifik Wiryani. 2009. *Reformasi Hak Ulayat*. Malang: Setara Press.
- Helmy Panuh, 2012, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Husein Alting. 2010. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Imam Sudiyat. 2004. *Hukum Adat Sketsa Azas*. Yogyakarta: Liberty.
- Mhd.Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis. 2010. *Pendaftaran Tanah Edisi Revisi Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Otje Salman. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suharyono M. Hadiwiyono. 2020. *Hukum Pertanahan di Indonesia: Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Malang: Inteligensia Media.
- Sukirno. 2018. *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Supriadi. 2016. *Hukum Agraria, pengertian dan lingkup Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Widhi Handoko. 2014. *Kebijakan Hukum Pertanahan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Yulia Mirwati. 2015. *Konflik Tanah Ulayat*. Padang: Andalas University Press.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

C. Jurnal

Alfi Khairi. 2018. "Implementasi Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017", dalam Jurnal Jom Fisip Vol. 5 Edisi II.

Desi Apriani, Arifin Bur. 2021. "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia", dalam Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 5, No. 2.

Ilyas Ismail, 2010, "Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional", dalam KANUN No. 50.

Mira Novana Ardani. 2019. "Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian", dalam Jurnal Gema Keadilan Volume 6, Edisi III.

Ngakan, P.O., Achmad, A., Wiliam, D., Lahae, K. and Tako, A., 2005. "Dinamika proses desentralisasi sektor kehutanan di Sulawesi Selatan", Case Study 11b on Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia,

Rahmat Riardo, 2019, "Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap di Kota Solok", Ejournal Kopertis Wilayah X, Vol. 2, No. 2.

Yul Ernis, 2018, “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18, No. 4, 2018.

D. Internet

Tim Penyusun, 2024, Kabupaten Agam dalam Angka 2024, BPS Kabupaten Agam, <https://agamkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/289fc7abcd2e1d302f569608/kecamatan-canduang-dalam-angka-2024.html>, dikunjungi pada tanggal 25 November 2024, Pukul 11.01 WIB.

